BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini telah ditemukan beberapa skandal kecurangan pada perusahaan perbankan yang dapat merugikan pihak-pihak berkepentingan khususnya pihak investor. Skandal kecurangan yang dialami oleh Bank Lippo, Bank BTN, Bank Century, Citibank, dan beberapa bank lainnya yang telah ditutup oleh lembaga penjamin simpanan karena adanya internal fraud dapat dijadikan sebagai contoh perbankan yang mengalami skandal kecurangan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) bank merupakan lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana dan kepercayaan dari masyarakat. Kegiatan operasional bank yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan mengakibatkan bank dihadapkan pada resiko yang besar. Sehingga didalam menjalankan kegiatan operasionalnya manajemen bank harus menciptakan sistem pengendalian internal yang mampu meminimalisasi terjadinya resiko yang mengarah pada tindakan kecurangan. Mengingat salah satu alasan penting terjadinya penipuan keuangan adalah kelemahan dari pengendalian internal dan kurangnya pengungkapan informasi terkait dengan pengendalian internal tersebut (Ding dan Leng, 2011). Kurangnya pengungkapan pengendalian internal membuat pihak investor tidak bisa menilai pengendalian internal perusahaan.

Pengendalian internal (*internal control*) merupakan tindakan apapun yang diambil oleh manajemen, dewan direksi, dan pihak lain untuk meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan tercapai (IIA). Menurut Moeller (2009) pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mencegah dan mendeteksi peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan. Suatu pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena merupakan suatu alat yang dapat menangkal terjadinya *fraud.* Sehingga dengan adanya pengendalian internal yang efektif dapat memastikan kebenaran dan keandalan informasi keuangan (Ding dan Leng, 2011). Karena kecurangan (*fraud*) tersebut sangat merugikan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan baik itu investor, kreditor, dan pihak pemangku kepentingan lainnya.

Pentingnya pengendalian internal bagi suatu perusahaan juga telah disampaikan oleh COSO (*Committee Of Sponsoring Organization*). Hal ini didukung dengan dikeluarkannya COSO's *Internal Control—Integrated Framework,* pengendalian internal merupakan suatu proses yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya (Moeller, 2009). Selain itu, Turner dan Owhoso (2009) di dalam bukunya juga menjelaskan bahwa pengendalian internal suatu perusahaan memiliki 3 fungsi, antara lain fungsi deteksi, fungsi pencegahan, dan fungsi koreksi. Ketiga fungsi tersebut dapat mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kelemahan yang mungkin akan terjadi di dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan. Serta dapat membantu manajemen untuk memperbaiki kesalahan yang telah ditemukan.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan termasuk para investor, kreditur, dan pihak pemangku kepentingan lainnya juga perlu mengetahui informasi mengenai pengendalian internal yang sedang diimplementasikan oleh perusahaan. Karena hal ini untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu pengendalian tersebut sudah dikelola dan diimplementasikan dengan efektif oleh manajemen untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dan proses bisnis yang sedang dijalankan bebas dari kecurangan (Than dan Cheung, 2011). Serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan tercapai. Keterbukaan informasi mengenai perusahaan tersebut dapat membantu investor dan kreditur dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi dan pemberian pinjaman kepada perusahaan (Hidayanti dan Sunyoto, 2012). Selain itu, keterbukaan informasi mengenai pengendalian internal perusahaan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan kelemahan internal yang mungkin ada di dalam sistem pengendalian internal perusahaan (Deng dan Ling, 2011). Sehingga suatu informasi mengenai pengendalian internal suatu perusahaan juga harus diungkapkan dalam laporan tahunan.

Terdapat beberapa aturan yang mengarahkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi pengendalian internal sebagai bentuk dari transparansi. Pertama, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 14/35/DPNP/2012 tentang laporan tahunan bank umum dan laporan tahunan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh bank umum harus mencakup perihal mengenai eksposur resiko dan

penerapan manajemen resiko bank. Karena berdasarkan Lamp. SE No.5/22/DPNP/2003 tentang sistem pengendalian internal bank umum, manajemen resiko merupakan salah satu elemen utama dari sistem pengendalian internal bank. Kedua, peraturan No.X K.6 mengenenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang di keluarkan oleh BAPEPAM selaku lembaga pemerintah badan pengawas pasar modal dan laporan keuangan. Dikeluarkannya peraturan tersebut oleh BAPEPAM dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan emiten dan perusahaan publik sebagai sumber informasi penting bagi para pemegang saham, investor, dan masyarakat luas dalam membuat keputusan investasi.

Selain peraturan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia terdapat beberapa peraturan juga yang berasal dari *Sarbanes Oxley* yang merupakan produk hukum Amerika Serikat yang bertujuan meningkatkan proses audit laporan keuangan secara spesifik dalam *Title IV: Enhanced Financial Disclosures* menyatakan bahwa setiap pengajuan laporan tahunan harus memuat laporan pengendalian internal yang menyatakan tanggung jawab manajemen untuk membangun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai. Kemudian dijelaskan pula dalam *Professional Guidance: A guide for management by internal control practitioners* yang dikeluarkan oleh IIA bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak manajemen untuk diungkapkan, antara lain: (a) pemahaman manajemen tentang perlunya melaksanakan pengendalian internal pada perusahaan, (b) manajemen perlu

mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pengendalian internal dan kondisi perusahaan sesungguhnya, (3) opini manajemen atas pengendalian internal yang telah dilakukan, apakah dapat memberikan keyakinan bahwa kelemahan material dapat dideteksi atau dicegah. Hal ini diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk meyakini bahwa perusahaan memiliki pengendalian yang efektif dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Pelaporan pengendalian internal oleh manajemen perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dari suatu perusahaan, dan merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pengendalian dari manajer karena mereka akan meningkatkan evaluasi terhadap kualitas pengendalian internal sebelum diungkapkan dalam laporan keuangan (Thanh dan Cheung, 2011). Evaluasi yang meningkat terhadap kualitas pengendalian internal akan memberikan keyakinan bahwa aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan bebas dari *fraud* dan informasi keuangan yang dihasilkan dapat dihandalkan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengungkapan pengendalian internal salah satunya adalah mekanisme *good corporate governance* (Ding dan Leng, 2011). Menurut FCGI (*Forum Corporate Governance for* Indonesia) *good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Good corporate governance* tersebut digunakan oleh investor sebagai alat untuk

mengendalikan tindakan manajemen dalam menjalankan perusahaan agar tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan pemilik (Dallas, 2004) dalam Nuryaman (2009). Selain itu juga merupakan suatu alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang diperkirankan berhubungan dengan pengungkapan informasi perusahaan. Struktur *corporate governance* yang berbeda pada perusahaan akan mempengaruhi pengelolaan perusahaan yang berbeda pula (Deng dan Ling, 2011). Menurut Babic (2005) dalam Nuryaman (2009) mekanisme *good corporate governance* dapat berupa mekanisme internal dan mekanisme eksternal yang didalamnya terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan tahunan termasuk juga kualitas pengungkapan informasi pengendalian internal perusahaan.

Dewan komisaris merupakan pimpinan tertinggi di dalam perusahaan yang dibentuk melalui rapat umum pemegang saham memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris akan mempengaruhi pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan manajer salah satunya yaitu tindakannya dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan tahunan (Zenuarisni, 2014). Dalam hal ini termasuk juga pengungkapan informasi mengenai pengendalian intern perusahaan. Karena proporsi komisaris independen yang lebih tinggi dalam anggota komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih kepada manajemen perusahaan.

Dewan direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Ukuran dewan direksi, yaitu banyaknya jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini terjadi karena semakin banyak dewan direksi maka otoritas kekuasaan akan semakin terpecah. Sehingga akan meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan mengungkapkan informasi mengenai perusahaan dalam laporan tahunan yang di dalamnya termasuk juga informasi mengenai pengendalian intern (Irwanto, 2012).

Komite audit merupakan pihak yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan manajemen perusahaan. Komite audit berperan dalam memeriksa proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan dan bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan audit internal maupun audit ekternal. Sehingga berbagai temuan audit akan segera dievaluasi oleh komite audit saat rapat komite audit yang kemudian dilaporkan kepada manajemen. Sehingga akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas terkait dengan informasi mengenai perusahaan, salah satunya yaitu informasi mengenai pengendalian intern.

Kepemilikan manajerial merupakan sebuah proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap

pengungkapan pengendalian intern karena semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak manajemen membuat pihak manajemen merasa ikut memiliki perusahaan. Sehingga akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Hal ini akan mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi perusahaan yang dibutuhkan oleh pemegang saham untuk melakukan pengambilan keputusan (Wulan, 2013).

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi seperti institusi keuangan, pemerintah, institusi berbadan hukum, dan intitusi luar negeri. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institutional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal, karena besarnya kepemilikan oleh pihak institusi membuat mereka memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan manajer dalam menjalankan aktivitas perusahaan termasuk keputusan mengenai informasi apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dalam melakukan pengambilan keputusan (Irwanto, 2012).

Beberapa penelitian terkait *corporate governance* dengan pengungkapan pengendalian internal adalah: (1) Ding dan Leng (2011) melakukan penelitian yang membahas tentang hubungan antara *corporate governance* dengan pengungkapan pengendalian internal perusahaan dengan menggunakan sampel 1309 perusahaan *nonfinancial* yang terdaftar di Cina pada tahun 2010. (2) Hunzikers (2013) melakukan penelitian tentang pengungkapan pengendalian internal dan biaya keagenan dengan menggunakan sampel 91 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Swiss.

Penelitian mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia masih terbatas, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan pengendalian internal pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 - 2013. Fokus pemilihan industri perbankan sebagai sampel penelitian karena bank merupakan lembaga yang dikenal sebagai *risk taking entities* (Oorschot, 2009). Meskipun bank diawasi oleh beberapa lembaga lebih banyak dibandingkan dengan manufaktur seperti Bapepam, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun pada kenyataannya masih terjadi kasus kecurangan yang berakibat pada dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia yang melibatkan pihak internal. Hal ini dibuktikan dengan ditutupnya 53 bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang disebabkan oleh adanya temuan pencurian atau *misconduct* dari internal bank (www.antaranews.com). Sehingga pengawasan internal dinilai harus benar-benar diperkuat. Penilaian internal tersebut dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi-informasi terkait dengan pengendalian internal yang diimplementasikan dalam laporan tahunan.

Penelitian ini menggunakan penerapan *good corporate governance* sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) karena didalam *good corporate governance* terdapat mekanisme internal dan mekanisme eksternal yang didalamnya terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan tahunan

termasuk juga kualitas pengungkapan informasi pengendalian internal perusahaan (Babic, 2005) dalam Nuryaman (2009). Sehingga pengungkapan informasi pengendalian internal perusahaan menjadi variabel yang dipengaruhi (variabel terikat). Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas pengungkapan pengendalian internal pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 - 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara penerapan *good corporate governance* terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2010 - 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 2010 - 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang pentingnya informasi pengendalian internal bagi investor dan *stakeholder* lainnya sehingga perlu untuk diungapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Selain itu penelitian ini juga untuk memperoleh pengetahuan mengenaipengaruh dari mekanisme *good corporate governance* terhadap luasnya pengungkapan pengendalian internal perusahaan dalam laporan tahunan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Menambah pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan perbankan untuk mencegah terjadinya kecurangan.

   b. Bagi Akademik

      Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian selanjutnya.

   c. Bagi Perusahaan

      Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam menyusun tata kelola perusahaan yang akan mempengaruhi dalam pengungkapan informasi pengendalian internal untuk memenuhi

prinsip transparansi dari *good corporate governance* serta hal-hal yang harus diungkapkan dalam pengungkapan pengendalian internal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis yang digunakan.

BAB 4: PEMBAHASAN

Bab ini akan memberikan uraian mengenai analisis dan pembahasan yang menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dibahas dan memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan penulis selanjutnya.